



RENCANA KERJA PERUBAHAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

TAHUN 2023

KABUPATEN PROBOLINGGO

Jl : Ahmad Yani Nomor 23 Probolinggo
Telp./Fax : (0335) 434455
Email : kesbangpoldanlinmaskabprob@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa berkat limpahan Rahmat dan HidayahNya Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 dapat disusun tepat waktu.

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 disusun sebagai arah dan pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo agar dapat memberikan kontribusinya terhadap Pembangunan Kabupaten Probolinggo sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2022 ini merupakan Penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023, untuk Tahun 2023 dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 dengan tema : **“Penguatan Ketahanan Ekonomi Inklusif melalui Peningkatan SDM, Pemenuhan Layanan Infrastruktur Berkelanjutan yang Ditunjang oleh Reformasi Birokrasi”**.

Dengan telah tersusunnya Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo Tahun 2023, maka agar senantiasa dapat dijadikan acuan dalam menyusun Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun Anggaran 2023 dan sebagai pedoman seluruh personil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo dengan memperhatikan tema pembangunan dan target kinerja Tahun 2023.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Probolinggo,

2023

KEPALA BAKESBANGPOL
KABUPATEN PROBOLINGGO

H. DODDY NUR BASKORO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19701030 199003 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KEPUTUSAN BUPATI PROBOLINGGO	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	5
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	6
BAB II EVALUASI KINERJA SOPD TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	8
2.1 REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN	8
2.2 REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA	13
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	24
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	24
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA	28
BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	30
BAB V PENUTUP	35

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Realisasi Anggaran s/d Triwulan II	8
Tabel 2.2 Evaluasi Capaian Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023 (s/d Juni 2023) ..	13
Tabel 3.1 Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2023.....	30



**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 47 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan sasaran, pagu anggaran, program dan kegiatan, target kinerja serta penambahan kelompok sasaran kegiatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Probolinggo tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2023.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewah Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomo 47. Tambahan Lembaran Negara Regara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 , Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standart Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran Daerah kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 2 Seri E);

22. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 40 Seri G) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 38 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 Nomor 38 Seri G);
23. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 18 Seri G)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2023 .

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah disesuaikan pada hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

Pasal 2

- (1) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berpedoman pada :
 - a. perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - b. hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

- (2) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
- a. perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah, mencakup :
 - analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
 - penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
 - b. penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Sistematika Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sebagai berikut :
- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
- BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : PENUTUP
- (2) Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 4

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RKA P-APBD) Tahun Anggaran 2023.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2023.

Pasal 6

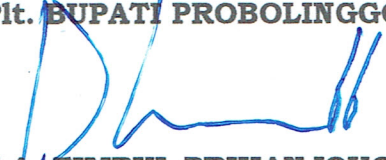
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 31 Agustus 2023

Plt. BUPATI PROBOLINGGO



H.A. TIMBUL PRIHANJOKO

XXIV. BAKESBANGPOL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Perubahan Tahunan Satuan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perubahan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (Renja Perubahan SOPD), adalah dokumen Perubahan perencanaan Satuan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen perubahan rencana tahunan Satuan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perubahan SOPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Renja Perubahan merupakan acuan SOPD untuk memasukan program kegiatan kedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Perubahan dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2023;
3. Renja Perubahan SOPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Perubahan Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Organisasi

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Perangkat Daerah pada Tahun 2023 ini merupakan tahun kelima pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perubahan SOPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perubahan SOPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan;
2. Program dalam Renja Perubahan harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan;
3. Program dan kegiatan dalam Renja Perubahan SOPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
4. Program dan kegiatan dalam Renja Perubahan dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 disusun dengan berpedoman kepada Permendagri 54 Tahun 2010 pasal 285, antara lain : RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan. Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud, seperti : perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan rencana program dan kegiatan prioritas daerah, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan dan keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 285 ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.

Sejalan dengan Tema Pembangunan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 yakni **“Penguatan Ketahanan Ekonomi**

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Inklusif melalui Peningkatan SDM, Pemenuhan Layanan Infrastruktur Berkelanjutan yang Ditunjang oleh Reformasi Birokrasi”, dapat mendukung terlaksananya Sasaran dan Kebijakan Strategis Pembangunan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Tahun 2023 yang menjadi tugas dan tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo. Adapun Sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya peningkatan pendidikan politik dan kesadaran hukum dalam masyarakat, meningkatnya pemahaman pembauran wawasan kebangsaan dan integrasi bangsa serta meningkatnya antisipasi terjadinya konflik untuk menciptakan keamanan di masyarakat.

Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan SOPD Tahun 2023 merupakan penjabaran Tahun ke-5 dari RPJMD 2018-2023. Rencana Kerja Perubahan SOPD yang telah tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan SOPD.

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 disusun atas dasar :

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

- 16.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Timur 2005-2025;
- 17.Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025;
- 18.Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023;
- 19.Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2023;
- 20.Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2023;
- 21.Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 40 Seri G) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 38 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 Nomor 38 Seri G);
- 22.Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2023;
- 23.Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam tata urut dokumen perencanaan, maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahunan.

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Sedangkan tujuan disusunnya Dokumen Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 adalah:

1. Menjabarkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 dalam rencana program kegiatan prioritas pada Tahun Anggaran 2023;
2. Menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun Anggaran 2023, karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah dalam kurun waktu satu tahun;
3. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan.

1.4. SISTIMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 disusun dengan sistematika, sebagai berikut :

- BAB I**

: PENDAHULUAN

Penjelasan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan yang memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- BAB II**

: EVALUASI KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Menjelaskan tentang Rekapitulasi Realisasi Anggaran dan Rekapitulasi Capaian/Realisasi Kinerja s.d. Triwulan II (sampai dengan bulan Juni 2023).
- BAB III**

: TUJUAN DAN SASARAN SOPD

Menjelaskan tentang telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Perubahan SOPD.

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

- BAB IV : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**
Menyajikan Program dan Kegiatan SOPD baik sebelum perubahan maupun setelah perubahan.
- BAB V : PENUTUP**
Memuat kesimpulan berbagai harapan dan tindak lanjut pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo Tahun 2023.

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

BAB II
EVALUASI KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

2.1 REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN

Hasil evaluasi terhadap realisasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik s.d. Triwulan II Tahun 2023 (s.d. Juni 2023) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Realisasi Anggaran s.d. Triwulan II Tahun 2023 (s.d. Juni 2023)

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.979.917.132	1.400.257.053	46,98
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	135.440.500	12.705.000	9,38
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.550.500	12.155.000	20,07
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0	0,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0	0,00
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	790.000	550.000	69,62
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	0	0	0,00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	0	0	0,00

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	74.100.000	0	0,00
II	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.223.692.000	1.126.585.038	50,66
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.223.692.000	1.126.585.038	50,66
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	0	0,00
3	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	0	0	0,00
III	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0,00
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0,00
IV	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	202.686.459	80.479.688	39,70
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.030.500	14.848.480	44,95
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.615.900	1.412.900	54,01
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.339.400	3.741.600	50,97
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.446.700	1.260.000	23,13
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	154.253.959	59.216.708	38,38
V	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	394.600.673	172.322.527	43,67
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.280.000	3.180.000	30,93
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.116.825	24.366.230	45,87
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.182.500	37.170.000	80,48
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	285.021.348	140.106.297	49,15
VI	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.500.000	8.164.800	10,53
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	57.500.000	8.164.800	14,19

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

	Operasional atau Lapangan			
2	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	20.000.000	0	0,00
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	439.285.300	112.717.000	25,65
VII	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	439.285.300	112.717.000	25,65
1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	191.668.200	51.041.000	26,62
2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	247.617.100	61.676.000	24,90
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	25.755.552.200	39.907.500	0,15
VIII	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	25.755.552.200	39.907.500	0,15
1	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	25.609.063.500	24.372.500	0,09

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

	Pemantauan Situasi Politik Di Daerah			
2	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	146.488.700	15.535.000	10,60
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	33.384.000	0	0,00
IX	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	33.384.000	0	0,00
1	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	22.256.000	0	0,00
2	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	11.128.000	0	0,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	433.239.000	193.452.500	44,65
X	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	433.239.000	193.452.500	44,65
1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama	370.035.000	188.113.000	50,83

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

	dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			
2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	63.204.000	5.339.500	8,44
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	213.298.000	49.114.000	23,02
XI	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	213.298.000	49.114.000	23,02
1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	44.833.500	0	0,00
2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12.535.000	3.230.000	25,76
3	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	9.418.500	2.874.000	30,51

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

	Penanganan Konflik di Daerah			
4	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	146.511.000	43.010.000	29,35
	J U M L A H	29.854.675.632	1.795.448.053	6,01

2.2 REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA

Hasil evaluasi terhadap Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik s.d. Triwulan II (s.d. Juni 2023) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2

Evaluasi Capaian Kinerja s.d. Triwulan II Tahun 2023 (s.d. Juni 2023)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target & Realisasi Kinerja Program & Keluaran Kegiatan SOPD Tahun 2023		
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Realisasi s.d. Triwulan II
1	2	3		
URUSAN WAJIB				
KESATUAN BANGSA DAN POLTIK DALAM NEGERI			29.854.675.632	1.795.448.053
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah	5 %	2.979.917.132	1.400.257.053
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Tersusun dan Berkualitas	100 %	135.440.500	12.705.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	60.550.500	12.155.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	1	0	0

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	0	0
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	790.000	550.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	0	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	74.100.000	0
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Tersusun Tepat Waktu	100 %	2.223.692.000	1.126.585.038
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima	16		1.126.585.038

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

	Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	2.223.692.000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen	0	0
Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	0	0
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pendukung Kedisiplinan Pegawai	100 %	0	0
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	0	0
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Pendukung layanan perkantoran	100 %	202.686.459	80.479.688
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	33.030.500	14.848.480
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	2.615.900	1.412.900
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	7.339.400	3.741.600
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	5.446.700	1.260.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	154.253.959	59.216.708

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	394.600.673	172.322.527
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	10.280.000	3.180.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	53.116.825	24.366.230
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	46.182.500	37.170.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	285.021.348	140.106.297
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpelihara	100 %	77.500.000	8.164.800
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	57.500.000	8.164.800
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	20.000.000	0
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang mendapat pembinaan tentang Penguatan Ideologi	95 %	439.285.300	112.717.000

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

	Pancasila dan Karakter Kebangsaan			
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Ormas/LSM/Tog a/Tomas yang meningkat pemahamannya tentang perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	95 %	439.285.300	112.717.000
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	360 Orang	191.668.200	51.041.000
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	300 Orang	247.617.100	61.676.000
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN	Persentase Ormas/LSM/Tog a/Tomas yang mendapat pembinaan tentang Peningkatan Peran Partai	95 %	25.755.552.200	39.907.500

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik			
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang meningkat pemahamannya tentang Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	95 %	25.755.552.200	39.907.500
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,	230 Orang	25.609.063.500	24.372.500

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

	Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	300 Orang	146.488.700	15.535.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang mendapat pembinaan tentang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	95 %	33.384.000	0
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang meningkat pemahamannya tentang Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	95 %	33.384.000	0
Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di	100 Orang	22.256.000	0

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4 laporan	11.128.000	0
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang mendapat pembinaan tentang Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	95 %	433.239.000	193.452.500
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang meningkat pemahamannya tentang Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	95 %	433.239.000	193.452.500
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang	Jumlah Orang yang Mengikuti	300	370.035.000	188.113.000

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang		
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	350 Orang	63.204.000	5.339.500
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang mendapat pembinaan tentang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	95 %	213.298.000	49.114.000
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan	Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang mendapat pembinaan tentang Peningkatan	95 %	213.298.000	49.114.000

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Penanganan Konflik Sosial	Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitas Penanganan Konflik Sosial			
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	200 Orang	44.833.500	0
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	26 Orang	12.535.000	3.230.000

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3 laporan	9.418.500	2.874.000
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4 dokumen	146.511.000	43.010.000
JUMLAH			29.854.675.632	1.795.448.053

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

3.1.1 KEBIJAKAN NASIONAL

Sejalan dengan kondisi aman dan damai yang makin mantap di seluruh wilayah Indonesia, kemampuan pertahanan nasional dan keamanan dalam negeri yang makin menguat yang ditandai dengan terbangunnya profesionalisme institusi pertahanan dan keamanan negara serta meningkatnya kecukupan kesejahteraan prajurit serta ketersediaan alat utama sistem persenjataan TNI dan alat utama POLRI melalui pemberdayaan industri pertahanan nasional. Kehidupan demokrasi bangsa makin mengakar dalam kehidupan bangsa sejalan dengan makin mantapnya kelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip toleransi, non diskriminasi dan kemitraan serta semakin mantapnya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Kondisi itu mendorong tercapainya penguatan kepemimpinan dan kontribusi Indonesia dalam berbagai kerjasama internasional dalam rangka mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil dan damai dalam berbagi aspek kehidupan. Bersamaan dengan itu kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang semakin mantap serta profesionalisme aparatur negara baik di pusat dan daerah semakin mampu mendukung pembangunan nasional.

Kesejahteraan rakyat terus membaik dan meningkat sebanding dengan tingkat kesejahteraan negara-negara berpenghasilan menengah dan merata yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang disertai terwujudnya lembaga jaminan sosial. Kualitas sumber daya manusia terus membaik ditandai oleh meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh manajemen pelayanan pendidikan yang efisien dan efektif, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, meningkatnya tumbuh kembang optimal serta kesejahteraan dan perlindungan anak, tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang dan mantapnya budaya dan karakter bangsa.

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Dalam rangka mewujudkan prioritas pembangunan Nasional maka tema pembangunan Tahun 2023 untuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional 2023 diurakan dalam 7 program prioritas pembangunan Nasional sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan Visi Pembangunan Nasional 2020-2024 adalah: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

3.1.2 KEBIJAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai pedoman berkelanjutan pembangunan sesuai RPJM tahap pertama, kedua dan ketiga, maka pembangunan tahap keempat ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Tahapan ini juga ditandai dengan makin dominannya peranan pengetahuan dan penguasaan teknologi serta diarahkan pada upaya optimal pendayagunaan potensi sumber daya. Kemajuan yang dicapai menjadikan daerah memiliki daya saing.

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Dalam kerangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dilaksanakan melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disertai dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat, terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam tropis lainnya yang dimanfaatkan untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa serta modal pembangunan pada masa yang akan datang. Adapun Tema Pembangunan Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut : **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT JAWA TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA, UNGGUL DAN BERAKHLAK DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PARTISIPATORIS INKLUSIF MELALUI KERJA BERSAMA DAN SEMANGAT GOTONG ROYONG”**

Sedangkan tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 adalah **“Peningkatan dan pemerataan kualitas SDM serta transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”**.

3.1.3 KETERKAITAN KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI DENGAN KEBIJAKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

Substansi pokok dalam perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan, capaian kinerja pemerintah daerah, kerangka ekonomi daerah, serta kebijakan kemampuan keuangan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka melakukan sinkronisasi kebijakan pembangunan, maka penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Probolinggo juga memperhatikan kebijakan nasional dan provinsi yaitu :

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

1. Arah kebijakan pemerintah pusat yang dijabarkan dalam 5 (lima) prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 dan sasaran pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
2. Arah kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur pada sasaran dan prioritas pembangunan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Probolinggo maka tema pembangunan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

“Mempercepat Pemulihan Pertumbuhan Ekonomi, Perlindungan Sosial, Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur Dasar”.

Sementara itu sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 dan Prioritas Pembangunan Nasional, maka Prioritas Pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pemulihan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan kawasan strategis, agropolitan, minapolitan, pariwisata, industri, dan ekonomi kreatif;
2. Meningkatkan perlindungan sosial, kesempatan kerja, peran pemerintah dan lembaga desa untuk mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan tata kelola kependudukan;
4. Meningkatkan cakupan layanan infrastruktur dasar dan penyediaan perumahan layak bagi masyarakat;
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
6. Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum, dan tanggap bencana;
7. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan melalui pelaksanaan reformasi birokrasi.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) Kabupaten Probolinggo berusaha menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan dengan mengacu kebijakan nasional dan kebijakan provinsi selain juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo dengan maksud menjaga konsistensi dan kesinambungan

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan disinergikan kebijakan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) terkait yang bersinggungan langsung dengan masyarakat.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAKESBANGPOL

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) Kabupaten Probolinggo mempunyai Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun yaitu Tahun 2018-2023, yang telah memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin akan timbul.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo sebagai pilar Pemerintah memiliki peran menumbuhkan kebersamaan Masyarakat Kabupaten Probolinggo yang damai, tentram, terlindungi hak dan kewajibannya untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila. Dalam rangka mewujudkan visi Misi Bupati Probolinggo, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama kurun waktu 5 tahun kedepan (2018-2023) akan mengemban visi Pembangunan Daerah (Visi Bupati Terpilih) Tahun 2018-2023.

Visi Bupati Probolinggo yang tercantum dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 yaitu :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PROBOLINGGO BERAKHLAK MULIA YANG SEJAHTERA, BERKEADILAN DAN BERDAYA SAING“

Tujuan dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi, yaitu meningkatnya toleransi antar umat beragama melalui Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Sedangkan indikator tujuan mengacu pada indikator tujuan Perubahan RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 yaitu indeks ketentraman masyarakat.

Sasaran (objective) merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek, biasanya satu tahun selama kurun waktu lima tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang ditetapkan. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

- a. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang kondusif;
- b. Meningkatnya antisipasi terjadinya konflik untuk menciptakan keamanan di masyarakat;

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah lainnya untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Program dan Kegiatan Perubahan yang direncanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 sesuai dengan plafond yang tersedia, adalah:

Tabel 3.1
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2023

SOPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.404.204.268	29.854.675.632	23.450.471.364
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.209.851.468	2.979.917.132	(229.934.336)
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	135.103.400	135.440.500	337.100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53.503.400	60.550.500	7.047.100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.500.000	0	(1.500.000)
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.500.000	0	(1.500.000)
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.500.000	790.000	(710.000)
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.500.000	0	(1.500.000)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.500.000	0	(1.500.000)
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	74.100.000	74.100.000	0
Kegiatan Administrasi Keuangan	2.322.218.636	2.223.692.000	(98.526.636)

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Perangkat Daerah			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.319.218.636	2.223.692.000	(95.526.636)
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.500.000	0	(1.500.000)
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.500.000	0	(1.500.000)
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	44.589.800	0	0
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	44.589.800	0	0
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	178.064.618	202.686.459	24.621.841
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.358.400	33.030.500	(7.327.900)
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.615.900	2.615.900	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.339.400	7.339.400	0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.005.100	5.446.700	(4.558.400)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	117.745.818	154.253.959	36.508.141
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	451.375.014	394.600.673	(56.774.341)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.280.000	10.280.000	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.500.000	53.116.825	(13.383.175)
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68.212.000	46.182.500	(22.029.500)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	306.383.014	285.021.348	(21.361.666)
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.500.000	77.500.000	(1.000.000)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	58.500.000	57.500.000	(1.000.000)
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	20.000.000	20.000.000	0
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	402.800.000	439.285.300	36.485.300

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	402.800.000	439.285.300	36.485.300
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	192.800.000	191.668.200	(1.131.800)
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	210.000.000	247.617.100	37.617.100
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.855.466.500	25.755.552.200	23.900.085.700
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	1.855.466.500	25.755.552.200	23.900.085.700
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	1.763.366.500	25.609.063.500	23.845.697.000
Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	92.100.000	146.488.700	54.388.700
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	86.880.000	33.384.000	(53.496.000)
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	86.880.000	33.384.000	(53.496.000)
Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan	60.480.000	22.256.000	(38.224.000)

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	26.400.000	11.128.000	(15.272.000)
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	482.680.000	433.239.000	(49.441.000)
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	482.680.000	433.239.000	(49.441.000)
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	391.340.000	370.035.000	(21.305.000)
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	91.340.000	63.204.000	(28.136.000)
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	366.526.300	213.298.000	(153.228.300)
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	366.526.300	213.298.000	(153.228.300)
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	86.482.800	44.833.500	(41.649.300)
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	86.654.200	12.535.000	(74.119.200)
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini,	16.833.300	9.418.500	(7.414.800)

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	176.556.000	146.511.000	(30.045.000)
J U M L A H	6.404.204.268	29.854.675.632	23.450.471.364

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo merupakan penjabaran Rencana Strategi (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo yang memuat program dan kegiatan perubahan Tahun 2023 dalam rangka menindaklanjuti adanya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Dengan telah tersusunnya dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 ini maka agar senantiasa dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo dan sebagai pedoman seluruh personil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo untuk meningkatkan kinerjanya sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Probolinggo, 2023

KEPALA BAKESBANGPOL
KABUPATEN PROBOLINGGO



H. DODDY NUR BASKORO, S.Sos, M.Si
Rembina Utama Muda
NIP. 19701030 199003 1 002

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL